

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan nasional dilandasi oleh paradigma membangun Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pemerataan pendidikan dan menempatkan guru pendidik profesional yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada tingkatan-tingkatan tertentu.

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting, maka menjadi keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya, karena tujuan pendidikan bersifat memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Pelaksanaannya hanya mungkin apabila tujuan yang ingin dicapai dibuat jelas, konkret dan memiliki berbagai fasilitas-fasilitas yang mendukung.

Sistem pendidikan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sosial budaya sebagai suprasistem tersebut dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu

menjadi sangat kompleks. Artinya suatu permasalahan intern dalam pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah pemerataan sarana dan prasarana sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis suatu wilayah, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya diluar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu kesuksesan hasil pendidikan secara nasional.

Ketertinggalan mutu pendidikan saat ini mulai dirasakan, baik pendidikan formal maupun informal, dan hasil itu diperoleh setelah membandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, seharusnya sumberdaya manusia Indonesia terus ditingkatkan agar tidak kalah bersaing dengan sumberdaya manusia di negara-negara lain.

Salah satu penyebab utama ketertinggalan mutu pendidikan di Indonesia adalah karena kurangnya pemerataan pendidikan, terkhusus dalam bidang pemerataan sarana fisik sekolah seperti ketersediaan gedung-gedung sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan pendidikan menjadi hal yang penting dalam iklim demokrasi dimana semua anak bangsa berhak untuk mengenyam pendidikan secara layak, sehingga tidak ada diskriminasi dimana yang kaya bisa mendapatkan pendidikan secara layak dan setinggi-tingginya, sementara yang kurang mampu belum bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan mereka meskipun secara intelektual mereka mumpuni.

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas

hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua pengelolaan tersebut satu sama lain saling mempengaruhi. Walaupun komponen-komponen cukup baik seperti tercukupinya tenaga-tenaga pendidik, namun jika tidak tersedianya prasarana dan sarana seperti gedung-gedung sekolah, maka tujuan pendidikan tidak dapat dicapai secara optimal.

Demikian pula bila pengelolaan dan perencanaan baik tetapi di dalam kondisi serba kekurangan, akan mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Untuk itu perlu diperhatikan setiap komponen-komponen yang mendukung terhadap proses pencapaian pendidikan yang seutuhnya seperti keberadaan peserta didik, tenaga pendidik, lingkungan sekolah dan pembangunan fasilitas yang memadai yang akan menyokong tercapainya tujuan pendidikan.

Pada saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol, diantaranya masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan serta masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping itu belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan satuan tingkat pendidikan. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.

Ketidakmerataan distribusi sarana pendidikan begitu tampak jelas di berbagai wilayah, kurangnya perencanaan dalam penentuan letak suatu sarana pendidikan diklaim menjadi penyebab utama tidak seimbangya ketersediaan

gedung-gedung sekolah dengan persebaran penduduk dilokasi tertentu yang mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar, maka mereka akan memiliki kemampuan dasar dalam bersaing dengan lingkungan hidup mereka. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat derap pembangunan.

Pada tahap pembangunan pendidikan telah diselenggarakan usaha penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan yang lebih luas dan lebih merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah telah memperluas jaringan pelayanan pendidikan sampai tingkat kecamatan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, agar masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan yang cukup. Pembangunan pendidikan dilaksanakan melalui pengembangan dan perluasan jaringan pelayanan

pendidikan agar berada sedekat mungkin dengan penduduk yang membutuhkannya.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ketahun mengakibatkan banyaknya permasalahan yang terjadi. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi menuntut tersedianya tempat bermukim serta fasilitas sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas yang dapat menopang hidup manusia. Namun demikian pada kenyataannya pembangunan di Indonesia kurang mampu berpacu dengan pesatnya pertumbuhan penduduk.

Sistem pendidikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan diberbagai bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan. Pendidikan yang merupakan suatu proses yang berkaitan dengan berbagai faktor penting, seharusnya perlu memperhatikan beberapa unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam proses pendidikan itu sendiri sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kualitas (*out put*) yang baik.

Sebagai Negara yang berkembang dan tengah melaksanakan pembangunan disegala bidang. Indonesia sekaligus menghadapi berbagai masalah kependudukan. Baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, diantaranya masih banyaknya jumlah penduduk yang belum bisa merasakan pelayanan pendidikan dengan baik, susahny untuk mendapatkan akses penuh terhadap sekolah, maupun kendala tentang penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang tersebar diseluruh wilayah kesatuan Indonesia.

Dari segi pendidikan, Indonesia masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Gini Index untuk pemerataan pendidikan di

Indonesia mencapai 0,32, angka ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakmerataan dibidang sektor pendidikan (www.yohanli.com//upaya-pemerataan-pembangunan). Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini terus menjadi lingkaran setan (*the vicious circle*). Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar, hal ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial.

Perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam pembangunan fasilitas bidang pendidikan. Pengadaan fasilitas dan layanan tersebut tentunya terkait erat dengan jumlah penduduk disuatu wilayah, sehingga dibutuhkan pengkajian analisis keberadaan penduduk untuk pembangunan fasilitas sarana pendidikan.

Wilayah Tapanuli Tengah adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di provinsi Sumatera Utara. Menurut hasil pendaftaran dan pendataan penduduk berkelanjutan (P3B) jumlah penduduk daerah ini pada tahun 2011 adalah 311.232 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat anak usia anak sekolah sebesar 98.899 jiwa, dengan persebaran usia 6-12 tahun (SD) sebesar 57.187 jiwa , usia 13 -15 tahun (SMP) sebesar 22.332 Jiwa, dan usia 16-18 tahun (SMA / SMK) sebesar 19.380 Jiwa. Namun berdasarkan data yang ada di kantor dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, jumlah anak usia sekolah pada tahun 2011 adalah: umur SD sebanyak 51.114 jiwa, SMP 18.465 jiwa dan tingkat SMA / SMK sebesar 13.349 jiwa, dengan demikian berarti ada anak usia sekolah yang tidak sekolah sebanyak 15.971 Jiwa.

Disisi lain sekolah yang dapat menampung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Sekolah dasar berjumlah 326 unit, Sekolah

Menengah Pertama 99 unit dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA /SMK) di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 58 unit (SMA 39 dan SMK 19), yang menyebar di 20 Kecamatan (BPS 2012). Pemerataan sebaran sarana dan prasarana berupa gedung-gedung sekolah disetiap kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli tengah belum menunjukkan keseimbangan antara fasilitas yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikasi dari banyaknya anak usia sekolah pergi jauh dari tempat tinggal untuk memperoleh pendidikan dengan berbagai sarana transportasi, baik transportasi umum maupun kendaraan pribadi (diantar oleh orang tua atau dengan berkendara sendiri).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Penyebaran sekolah yang tidak merata, bagaimana persebaran jumlah dan jenis sekolah, jarak tempuh sekolah yang jauh, akses transportasi yang sulit, pertumbuhan penduduk tinggi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada perimbangan jumlah anak usia sekolah dengan penyebaran sarana pendidikan (SD, SMP, SMA / SMK) di Kabupaten Tapanuli Tengah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah ?

2. Bagaimana penyebaran sarana pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Bagaimana perimbangan jumlah anak usia sekolah dan persebaran sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Mengetahui penyebaran sarana pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Mengetahui perimbangan anak usia sekolah dengan penyebaran sarana pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam membuat kebijakan penyebaran dan penempatan lokasi sekolah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lanjutan dalam bidang yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda.
3. Bagi penulis sebagai penambah pengetahuan dalam menyusun karya tulis dalam bentuk skripsi.